

Desain Sistem Informasi Akuntansi Desa dalam Rangka Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa

Design of Accounting Information Systems in Village to Improve Transparency and Financial Accountability

Rusmianto* dan Eko Winkenali

Politeknik Negeri Lampung

Jalan Soekarno Hatta No 10 Rajabasa Bandar Lampung Telp: (0721) 703995, Kodepos 35142

*e-mail: antopoliteknik@gmail.com

ABSTRACT

One important aspect in village governance is the financial aspect of the village. As the smallest autonomous regions in the governance of the Republic of Indonesia, the village was given the autonomy to manage income and expenses independently. One consequence of the enactment of Law No. 6 of 2014 is a village source of revenue in the form of transfer funds budgeted in the village of APBN and APBD. Spill management of substantial funds legally also accompanied by demands for accountability or liability fund management both horizontally and vertically from the community of the local government and central government. In general the level of accountability and transparency in the financial management of the village is still low. Therefore, the design of financial accounting information system applications village is required to improve the accountability and transparency of village finances. This research was conducted with the objective of designing an application for financial accounting village. Analysis of the village administration system accounting officer found that the organizational structure of the financial administration of the village consists of: the village head, village secretary, the section chief and treasurer of the village. Data flow diagram (DFD) level 0 includes entities associated with the application system of financial management which includes the village of system administrators and system operators. Data flow diagram (DFD) level 1 consists of: Data processing general parameters, data processing parameters village, budget data processing, data processing and data processing penatusahaan bookkeeping.

Key Words : Village Accounting Information Systems Design, Data flow diagrams, Finance Village

Diterima : 30 Agustus 2016, disetujui 08 September 2016

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan daerah otonom dengan berbagai kemandirian pemerintahannya seperti : pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, badan perwakilan desa (semacam DPRD desa), dan kemandirian pembuatan peraturan desa. Otonomi desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik melalui tata pemerintahan yang lebih cepat tanggap, akuntabel dan transparan.

Salah satu aspek penting di dalam tata pemerintahan desa adalah aspek keuangan desa. Sebagai daerah otonom terkecil dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), desa diberi otonomi untuk mengelola pendapatan dan pengeluarannya secara mandiri. Salah satu konsekuensi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Desa memperoleh sumber pendapatan berupa transfer dana desa yang dianggarkan dalam APBN, transfer alokasi dana desa yang dianggarkan dalam APBD yang jumlahnya minimal 10% dari total dana transfer pemerintah pusat diluar Dana Alokasi Khusus (DAK) dan transfer bagi hasil pendapatan asli daerah (PAD) yang secara keseluruhan jumlahnya cukup besar untuk setiap desa sebagai sumber pendapatan terbesar desa selain pendapatan asli desa (PADesa). Sebagai contoh, Tahap I Dana Desa Tahun 2015 yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke desa-desa di seluruh Indonesia berjumlah Rp9,066 T (Sembilan koma enam puluh enam trilyun rupiah).

Limpahan pengelolaan dana yang besar secara legal juga diiringi dengan tuntutan akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan dana baik secara horizontal dari masyarakat maupun secara vertikal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 telah mewajibkan bagi setiap desa untuk menyusun laporan keuangan desa dan melaporkannya ke pemerintah daerah secara berkala setiap 1 semester sekali. Dan melaporkan pertanggungjawab keuangan berupa laporan keuangan tahunan kepada masyarakat melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) setiap tahunnya.

Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Akuntabilitas keuangan desa yang baik merupakan salah satu indikator pengelolaan keuangan yang baik. Setiap desa harus dapat mengelola dan menatausahakan keuangan desa dengan transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan mendorong terciptanya partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, serta efektif dan efisiennya proses pembangunan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, tujuan pelayanan publik yang berakhir pada kesejahteraan warga desa akan semakin mudah tercapai.

Subroto (2009) menyatakan bahwa secara umum pengelola tingkat desa belum menyelenggarakan administrasi keuangan desa dengan baik dan benar. Furqani (2010) menyimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan pada desa-desa di kabupaten sumenep sangat rendah. Setyoko (2011) juga menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan negara pada tingkat desa belum berhasil hal ini ditunjukkan dengan rendahnya tingkat akuntabilitas keuangan desa. Salah satu sebab kegagalan ini adalah rendahnya kemampuan administrasi keuangan desa. Temuan-temuan ini dikuatkan dengan hasil survei Kementrian Dalam Negeri Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan undang-undang desa dan peraturan pelaksanaannya khususnya pengelolaan dana desa adalah : (1) Kurangnya perhatian para pimpinan di daerah dalam mendorong pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel; (2) Kurangnya sumber daya manusia yang menguasai pengelolaan keuangan/akuntansi; (3) Belum memanfaatkan aplikasi dalam pengelolaan keuangan desa. Akar permasalahan dari rendahnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa adalah tidak adanya sistem yang baku dan seragam didalam administrasi maupun pencatatan keuangan desa yang dilakukan secara manual maupun secara terkomputerisasi. Oleh karena itu, Pengembangan model sistem informasi akuntansi desa merupakan jawaban atas rendahnya akuntabilitas dan transparansi keuangan desa ini.

Sistem Informasi Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2013). Dalam tataran desa, pengembangan sistem informasi akuntansi akan menyediakan suatu sistem pengelolaan keuangan yang seragam baik secara manual maupun terkomputerisasi bagi setiap desa. Dimulai dari bagaimana data keuangan dikumpulkan, dicatat, dilaporkan dan didokumentasikan. Dengan adanya sistem ini, informasi keuangan akan disajikan secara akurat, handal

dan tepat waktu sehingga relevansi informasi keuangan bagi para pihak yang berkepentingan akan terjaga. Pada akhirnya, akuntabilitas dan transparansi keuangan desa akan baik.

Kecenderungan *End User Computing* dipengaruhi oleh berubahnya sistem pengelolaan keuangan desa dari yang manual ke sistem yang terkomputerisasi dan meningkatnya pengetahuan tentang komputer di pihak pengguna seiring dengan peningkatan teknologi perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat digunakan. Dalam kerangka manajemen hubungan pelanggan, sistem informasi yang penggunaannya relatif diterima oleh pengguna (pelanggan) akan meningkatkan nilai layanan yang diberikan institusi di mata pelanggannya. Oleh karenanya, perlu diketahui bagaimana sikap dan perilaku yang dirasakan *user* terhadap sistem informasi yang digunakan.

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan tujuan mendesain suatu aplikasi akuntansi bagi keuangan desa serta menganalisis penerimaan pengguna terhadap sistem informasi akuntansi keuangan desa.

METODE

Tahap pengembangan yang dilakukan dalam penelitian ini diawali dengan analisis proses bisnis dan kebutuhan sistem. Langkah berikutnya berupa tahap perancangan sistem dengan pembuatan perancangan proses menggunakan pemodelan *Data Flow Diagram*, perancangan *database* dengan menggunakan *EntityRelationship Diagram* yang diteruskan dengan perancangan tabel, dan perancangan *interface*. Setelah tahap perancangan selesai, maka dilanjutkan implementasi dan pengujian aplikasi. Pembangunan aplikasi menggunakan bahasa *Borland Delphi 6.0 Enterprise*, dan *Microsoft Access 2007* sebagai *DBMS*. Pengujian sistem dilakukan dengan diawali dengan *Black Box Test* yang menguji fungsional sistem dan *Alpha Test* yang dilakukan oleh perangkat desa yang nantinya akan menggunakan sistem.

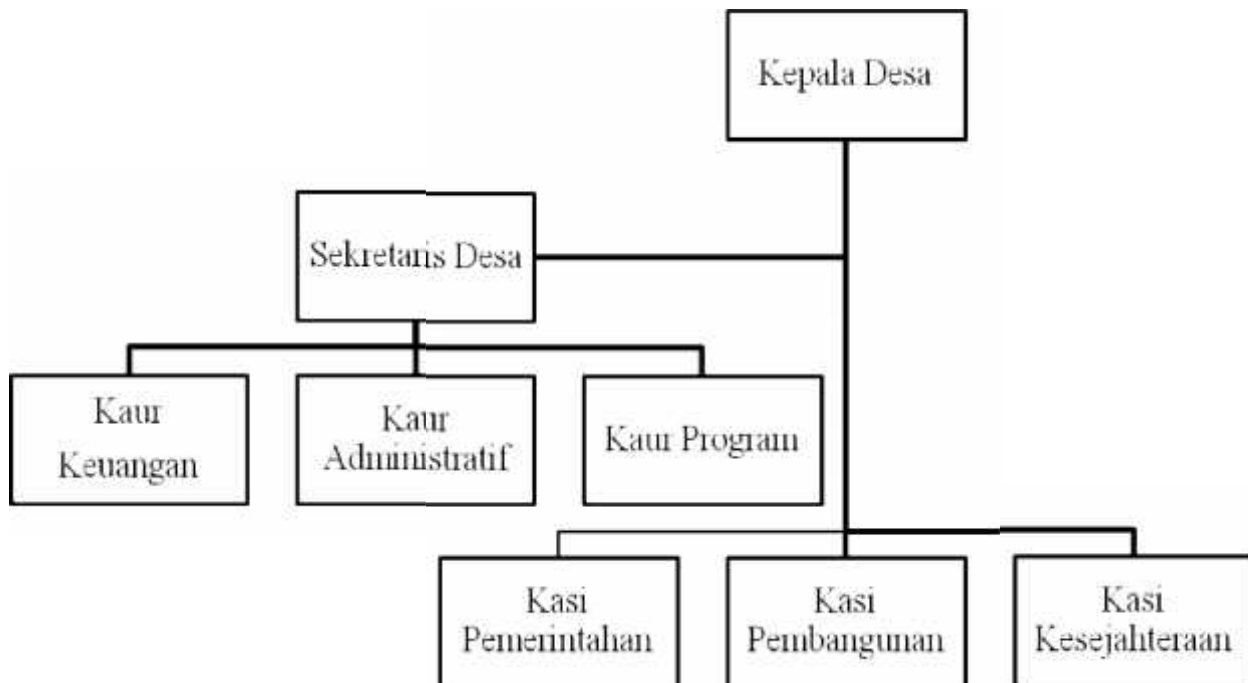
HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kebutuhan Sistem

Desa merupakan entitas terendah dalam hirarki pemerintahan suatu negara yang tidak terlepas dari berbagai peraturan dan kebijakan yang melingkupinya. Begitu juga dalam pengelolaan keuangannya, desa harus mematuhi berbagai peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh entitas di atasnya agar pemerintah desa terlepas dari berbagai sanksi administrasi maupun hukum. Secara khusus, pengadministrasian pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Oleh karena itu, pengembangan sistem pengelolaan keuangan desa didasarkan pada peraturan menteri tersebut dan juga perundangan dan peraturan lainnya yang secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis peraturan di Desa
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan desa
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang pelaksanaan pertanggungjawaban transfer ke daerah dan dana desa
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.07/2014 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transfer ke daerah dan dana desa

Berdasarkan hasil analisis terhadap kebutuhan keuangan desa, maka struktur organisasi pengelolaan keuangan desa dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 8 Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini kepala desa memiliki kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan PTPKD;
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa selaku coordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) membantu kepala desadalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

3. Kepala Seksi

Kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala seksi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;

- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara Desa

Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan yang dilakukan antara lain :

- a. menerima, menyimpan, menyetor/membayar
- b. memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya
- c. melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
- d. mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Data Flow Diagram (DFD) Level 0 Sistem Pengelolaan Keuangan Desa

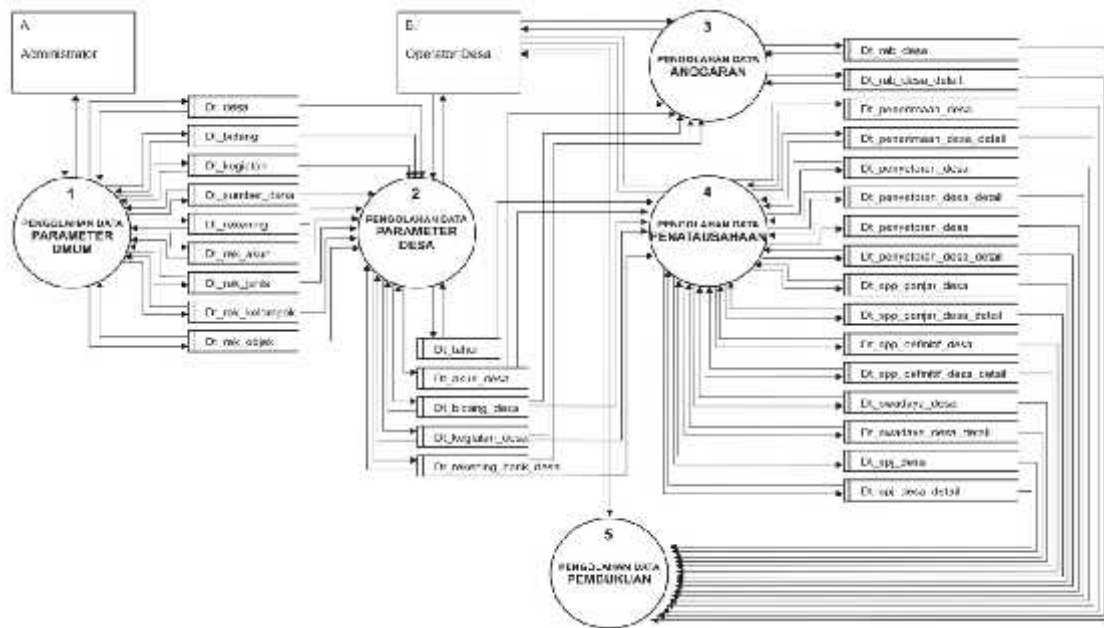
Data Flow Diagram (DFD) Level 0 menggambarkan hubungan sistem dengan lingkungan luar sistem yang masih berkaitan dengan sistem. Entitas-entitas yang terkait dengan sistem aplikasi ini adalah administrator sistem dan operator desa. Bentuk Data Flow Diagram (DFD) Level 0 ditunjukkan pada Gambar 9 berikut ini.



Gambar 9. Diagram Konteks Sistem Pengelolaan Keuangan Desa

Data Flow Diagram Level 1 Sistem Pengelolaan Keuangan Desa

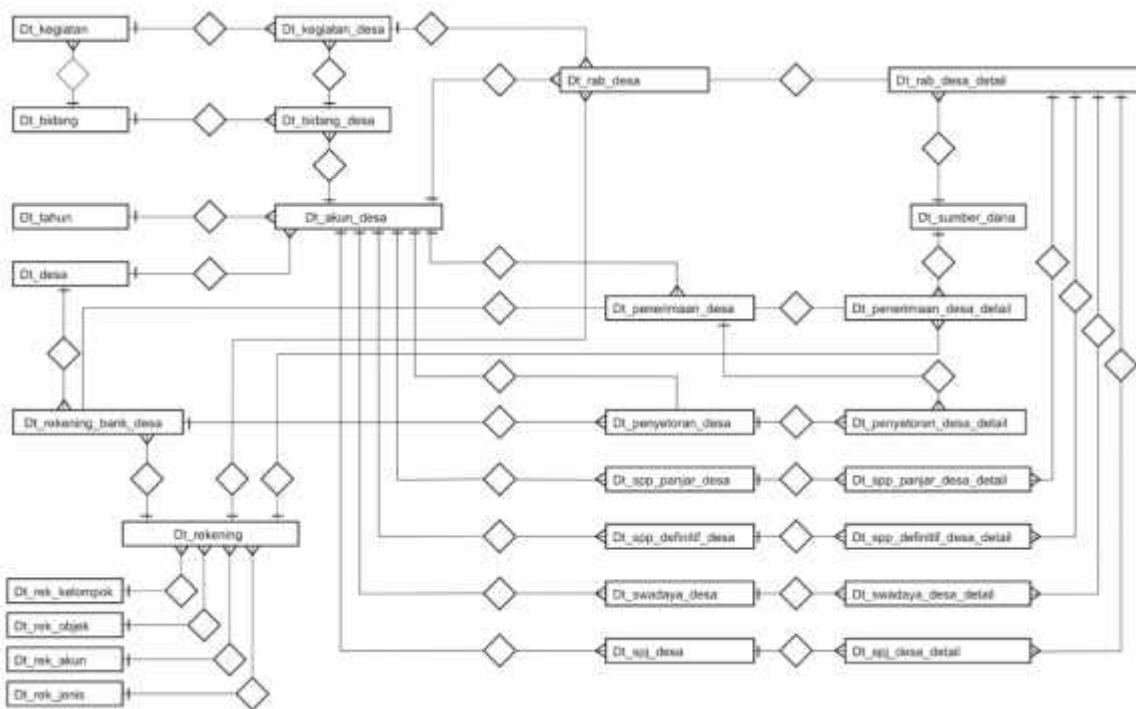
DFD level 1 merupakan analisis detail dari diagram konteks. DFD level 1 menggambarkan proses-proses yang ada dalam sistem dan aliran data ke dalam penyimpanan data (*data storage*). Bentuk DFD level 1 ini ditampilkan pada Gambar 10 berikut ini. Pada DFD level 1 terdapat empat proses dalam sistem yaitu: pengolahan data parameter umum, pengolahan data parameter desa, pengolahan data anggaran, pengolahan data penatausahaan, dan pengolahan data pembukuan.



Gambar 10. DFD Level 1 Sistem Pengelolaan Keuangan Desa

Entity Relationship Diagram (ERD) sistem pengelolaan keuangan desa

Entity Relationship Diagram (ERD) menggambarkan tipe data dalam konteks entitas dan relasi antar entitas tersebut. Bentuk Entity Relationship Diagram (ERD) sistem pengelolaan keuangan desa tampak seperti Gambar 11 berikut ini.



Gambar 11. Entity Relationship Diagram (ERD) sistem pengelolaan keuangan desa

KESIMPULAN

Berdasarkan Pembahasan dapat disimpulkan bahwa desain aplikasi pengelolaan keuangan desa didasarkan pada implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; *Data Flow Diagram (DFD) level 0* menggambarkan entitas yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari administrator dan operator aplikasi ; *Data Flow Diagram (DFD) level 1* terdiri dari 5 modul yaitu : Pengolahan data parameter umum, pengolahan data parameter desa, pengolahan data anggaran, pengolahan data penatusahaan dan pengolahan data pembukuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Furqoni, Astri. 2010. *Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Governance*. Tesis PPS UPN"Veteran". (www.eprints.upnjatim.ac.id/1518/1/File_1.pdf, diakses 25 April 2015)
- Katz, Ellen, 2004, *Transparency in Government-How American Citizens Influence Public Policy*, Journal of Accountancy, Juni 2004, hal. 1-2
- Laudon, 2006, *Management Information Systems, Managing The Digital Firm*, Tenth Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Pertama, Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Riyanto, Teguh. 2015. *Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara*. e-jurnal Administrasi Negara Vol 3 No 1 (119-130).
- Setiadi, T dan Fikrianto, H. 2014. *Pembangunan Sistem Informasi Akuntansi untuk Pengolahan Keuangan pada Koperasi Unit Desa berbasis Multi User*. Prosiding Seminar Nasional Hasil - Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM UMP.
- Setyoko, PI. 2011. *Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol (11), No (1).
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Tesis PPS Undip. (www.eprints.undip.ac.id/7610/1/Agus_Subroto.pdf, diakses 24 April 2015)
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta.
- Wilkinson, Joseph W. 2003. *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Terjemahan Maulana. Penerbit Binarupa Angkasa. Jakarta.
- Yahya, Idhar. 2006. *Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Sistem Teknik Industri Vol. 7. No. 4